

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JAYAPURA

YULIATI KALA'PADANG, IMELDA MARGARETA WALLY

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura dengan titik berat masalah pada, bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura dengan tujuan untuk mengetahui Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura

Untuk mengkaji dan mengetahui Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura maka penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan dasar penelitian studi survey dengan unit analisisnya adalah seluruh pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Untuk memperoleh data maka penelitian ini menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu melalui penyebaran kuisioner kepada responden yang dipadukan dengan proses observasi dan wawancara pada tokoh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura sudah terlaksana namun belum maksimal karena dari Tiga Objek yang diteliti, hanya dua objek wisata yang mendapat perhatian dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura.

A. Latar Belakang

Perkembangan dan persaingan globalisasi dalam ruang lingkup pariwisata memiliki hubungan yang erat dengan budaya khususnya ditinjau dari segi kearifan lokal masyarakat. Hal tersebut menjadikan kebudayaan itu menjadi sangat penting bagi masyarakat adat yang mendiami wilayah-wilayah bebas akses pariwisata.

Negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan dimana memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, agama dan kekayaan alam. Hal tersebut menjadi peluang bagi negara Indonesia yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk menunjang pengembangan pariwisata. Pemeliharaan seni budaya dan pengembangan pariwisata juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disuatu wilayah. Disisi lain pemanfaatan aset budaya pada aspek pariwisata berpeluang untuk menunjang perekonomian daerah sebagai penghasil devisa di negara Indonesia.

Pemanfaatan dan pelestarian potensi budaya dibidang pariwisata secara berkesinambungan, merupakan strategi Pemerintah Indonesia untuk meraih peluang pengembangan industri kecil dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk mendorong investasi negara. Tidak terlepas dari pemanfaatan potensi budaya, keberhasilan

pembangunan pariwisata disuatu wilayah dipengaruhi oleh berbagai faktor dan aktor yang terlibat secara langsung dalam pengembangan pariwisata.

Pencapaian dan keberhasilan pengembangan objek wisata yang dibarengi oleh nilai-nilai budaya sangat dipengaruhi oleh peran dan komitmen kerja dari aktor-aktor terkait. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan salah satu aktor pemerintah yang memiliki peran penting dalam menangani pengembangan dan wisata dilihat dari latarbelakang budaya diwilayah Indonesia. Selain Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, keterlibatan masyarakat dan kelayakan tempat wisata juga menjadi faktor penting guna menunjang pengembangan tempat wisata.

Kabupaten Jayapura merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua yang mempunyai potensi sumber daya wisata. Keunggulan pada aspek pariwisata yang sejalan dengan ciri khas budaya, menjadikan kabupaten Jayapura sebagai destinasi wisata yang menunjang penguatan ciri khas budaya dalam proses pembangunan. Pemerintah kabupaten Jayapura dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus berupaya untuk melaksanakan dan menciptakan berbagai program kegiatan guna mendukung kemajuan sektor pariwisata di wilayah

kabupaten Jayapura. Proses yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menampilkan nilai-nilai budaya masyarakat adat kabupaten Jayapura pada pengembangan sektor pariwisata dilaksanakan secara bertahap. Promosi pagelaran seni dan tari, pameran makanan khas, serta diadakan berbagai kegiatan festival budaya ditempat-tempat yang menjadi area wisata adalah bukti kongkrit program kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata di Kabupaten Jayapura.

Sebagai langkah awal pada tahun Tahun 2017, pemerintah kota Jayapura berhasil menggelar kegiatan Festival Danau Sentani (FDS) pertama, yang kemudian dilakukan sebagai kegiatan festival pariwisata tahunan. Festival ini dimeriahkan dengan tari-tarian adat, upacara adat penobatan ondoafi (kepala suku), pameran kerajinan kulit kayu, seni ukir, kegiatan perjalanan mengelilingi danau Sentani dan berbagai sajian kuliner berciri khas Papua. Pelaksanaan Kegiatan Festival Danau Sentani dilaksanakan dengan melibatkan berbagai paguyuban dari beberapa kabupaten, pelajar dari tingkat Sekolah hingga Perguruan Tinggi, dan masyarakat umum.

Selain kegiatan Festival Danau Sentani, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan kegiatan Festival Bahari Tanah Merah (FBTM) sebagai kegiatan tahunan. Kegiatan Festival Bahari Tanah Merah bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai adat dan budaya bertajuk pesona bahari guna mewujudkan antusias masyarakat suku Tanah Merah dalam mewujudkan pengembangan wilayah wisata di pesisir pantai wilayah Kecamatan Depapre.

Tidak hanya melaksanakan kegiatan festival budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan pemugaran beberapa tempat yang strategis untuk dijadikan tempat wisata. Wisata gunung Telatabis, telaga *Love*, penataan restoran-restoran apung dipinggiran kawasan Danau Sentani, pemeliharaan situs-situs perang dunia kedua dikawasan Ifar Gunung, pembangunan *homestay* dikawasan pantai Depapre, wisata Kali Biru Genyem turut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk dikunjungi. Penataan kawasan wisata tersebut sangat berpotensi untuk menjadikan Kabupaten Jayapura sebagai Kabupaten ekowisata dalam menghadapi perkembangan globalisasi yang membawa dampak terhadap marginalisasi budaya.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai budaya dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura berdasarkan visi dan misi. Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura adalah terwujudnya pariwisata Kabupaten Jayapura yang unggul untuk mengangkat harkat dan martabat,

serta meningkatkan kesejahteraan sosial, budaya ekonomi masyarakat dalam lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan Misi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura terdiri dari 6 (enam) poin yaitu

1. Menyebarluaskan penerapan pendekatan pengembangan dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan daya saing pariwisata Kabupaten Jayapura ditingkat nasional dan internasional melalui pengelolaan daya tarik wisata dan pelayanan wisata yang berkualitas tinggi, serta pemasaran wisata yang tepat sasaran.
3. Mengurangi ketimpangan pembangunan melalui penyebaran kegiatan pariwisata yang mencakup kawasan-kawasan yang belum maju di Kabupaten Jayapura.
4. Menjalinkan kelembagaan kepariwisataan yang berazaskan kerjasama yang saling menguntungkan antar sektor pemerintah swasta dan masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Jayapura dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan kegiatan masyarakat
6. Meningkatkan usaha masyarakat dibidang pendukung pariwisata untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura oleh aparatur Pemerintah seharusnya dilakukan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa permasalahan di wilayah-wilayah pariwisata yang sering berbenturan dengan aturan-aturan terkait dengan prospek pengembangan pariwisata. Permasalahan-permasalahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya perhatian dari Dinas terkait dalam pemeliharaan tempat-tempat wisata secara berkesinambungan. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup signifikan karena, setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival budaya tahunan, objek-objek wisata tidak lagi direnovasi. Seharusnya objek wisata terus difungsikan dan direnovasi mengingat bahwa tidak hanya pada Kegiatan Festival budaya saja yang padat dengan kunjungan wisatawan, tetapi pada hari-hari libur banyak wisatawan yang mengisi waktu liburan dengan mengunjungi tempat-tempat wisata di Kabupaten Jayapura.
- b. Kurangnya promosi dan sosialisasi objek wisata dimedia cetak maupun dimedia sosial. Promosi dan sosialisai menjadi bagian penting dalam proses memperkenalkan objek-objek

wisata kepada wisatawan lokal maupun wisatawan internasional. Mengingat bahwa keterbukaan akses informasi di jejaring sosial maupun media cetak mampu dan mempermudah Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk memberikan informasi kepada penikmat wisata dimana saja.

- c. Kurangnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap masyarakat dibidang ekonomi dalam pengelolaan sumber pendapatan dari tempat-tempat wisata. Pengelolaan pendapatan objek wisata tidak hanya dikelola seutuhnya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, tetapi masyarakat juga menjadi bagian yang tidak terlepas sebagai motor penggerak ekonomi wisata. Persoalan yang terjadi adalah minimnya perekonomian masyarakat dalam permodalan usaha menjadi pengaruh terhadap persaingan masyarakat lokal dan non-lokal terutama dalam penanaman modal usaha. Pemerintah Kabupaten Jayapura sebagai wadah penunjang ekonomi masyarakat lokal, seharusnya mampu mengintegrasikan ekonomi masyarakat lokal sehingga mampu bersaing dengan pengusaha non-lokal yang menanam modal diseluruh tempat wisata di Kabupaten Jayapura
- d. Selain permasalahan pada tiga poin di atas, benturan peraturan adat (kearifan lokal) dan peraturan Pemerintah juga menjadi salah satu faktor terhambatnya pengembangan tempat-tempat pariwisata. Dengan berkembangnya pengaruh modernisasi dalam kebiasaan kehidupan masyarakat adat, menciptakan suatu kesenjangan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Begitu juga dengan penerapan peraturan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terdapat poin-poin yang mengikuti perkembangan modernisasi namun tidak sejalan dengan peraturan adat masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah wisata. Hal ini menjadi dilema bagi Pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan sumber daya pariwisata di Kabupaten Jayapura.
- e. Permasalahan yang terakhir adalah masalah keamanan ditempat wisata yang menjamin kenyamanan pengunjung ditempat wisata. Pelayanan keamanan yang baik merupakan salah satu faktor yang sangat sensitif terhadap kepercayaan wisatawan untuk mengunjungi sejumlah tempat wisata di Kabupaten Jayapura. Tingkat kerawanan kejahatan di Kabupaten Jayapura sering terjadi pada akses perjalanan menuju tempat-tempat wisata. Hal ini tentunya perlu diperhatikan sebagai wujud dari usaha memajukan potensi wisata di Kabupaten Jayapura.

Dari pemaparan diatas penulis menganggap persoalan dan masalah yang terjadi sangat menarik

untuk dianalisa dalam sebuah penelitian yang menjelaskan peran Pemerintah Kabupaten Jayapura khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap peningkatan dan pengelolaan objek-objek wisata. Maka penulis menuangkan hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Mengembangkan Objek Wisata di Kabupaten Jayapura

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka masalah penelitian kemudian dirumuskan sebagai berikut Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian, Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura
2. Kegunaan penelitian
 - a. Bagi Praktis, Diharapkan dapat menjadi masukan bagi institusi mengenai Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura
 - b. Bagi Akademik, Diharapkan agar ini dapat semakin menambah wawasan dan referensi yang berhubungan dengan isu-isu dan fenomena birokrasi, baik bagi kalangan umum maupun kalangan akademik.

II. KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional

Penataan ruang pada dasarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mengembangkan wilayah yang bertujuan untuk mendukung komisi, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan serta ditunjang dengan beberapa sarana prasarana demi mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh masyarakat dan pemerintah nasional dalam pengembangan daerah-daerah pariwisata yang berada di daerah kepulauan Indonesia. Yoeti (2011:34)

Penataan ruang untuk menunjang kepariwisataan nasional tidak hanya memberikan arahan lokasi investasi, tetapi juga harus memberikan jaminan terpeliharanya ruangan/daerah pengembangan pariwisata yang berkualitas dan mempertahankan keberadaan objek-objek pariwisata sebagai aset besar bangsa. Keterbatasan dukungan sarana dan prasarana penunjang merupakan juga salah satu yang perlu mendapat perhatian. Dimana dukungan sarana dan prasarana merupakan faktor penting untuk

keberlanjutan penyelenggaraan kegiatan pariwisata, seperti penyediaan akses, akomodasi, angkutan wisata dan sarana prasarana pendukung lainnya. Masih banyak kawasan wisata yang sangat berpotensi, tetapi masih belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana yang dibangun hanya untuk kepentingan saja, belum dapat melayani kebutuhan penyelenggaraan pariwisata diluar lokasi. Seperti misalnya penyediaan angkutan wisata hanya tersedia di area kawasan saja, tetapi sarana angkutan untuk mencapai kawasan tersebut dari akses luar belum tersedia. Pendit (2012:51)

2. Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Dalam Mengembangkan Kepariwisata

- a. Pengembangan wilayah dengan pendekatan pengembangan ekosistem, yaitu penataan penataan ruang dilakukan dengan pendekatan secara terpadu dan terkoordinasi, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- b. Peningkatan keterkaitan fungsi pengembangan kegiatan pariwisata yang baik dengan sektor lainnya untuk memberikan nilai efisiensi yang tinggi dan percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah.
- c. Pengembangan pariwisata harus dikaitkan dengan pengembangan ekonomi nasional, wilayah dan lokal. Pada tingkat nasional sektor pariwisata harus berperan sebagai *prime mover* dan secara interaktif terkait dengan pengembangan sektor-sektor lain.
- d. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran masyarakat terlibat dimulai sektor hulu (memberikan kegiatan produksi yang ekstraktif) sampai dengan hilir (kegiatan produksi jasa).
- e. Pemanfaatan rencana pengembangan wilayah secara nasional yang dalam hal ini harus terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Didalam RTRWN ini diberikan arahan-arahan fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung dapat dioptimalkan juga sebagai kawasan yang memberikan dukungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata (*forets tourism*) dan kawasan budidaya memberikan alokasi-alokasi ruang untuk pengembangan pariwisata, terutama dengan kawasan-kawasan andalan dengan sektor unggulannya adalah pariwisata.
- f. Pengembangan dukungan sarana-prasarana transportasi secara terpadu intermoda dan terkait dengan struktur pengembangan wilayah. Suryono (2013:47)

3. Kegiatan-Kegiatan Yang Dapat Diambil Dalam Pengembangan Kepariwisata Nasional Di Wilayah-Wilayah Indonesia

- a. Pemanfaatan RTRWN, RTRW Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam penyesuaian dengan arahan alokasi pemanfaatan ruang.
- b. Peningkatan koordinasi lintas sektoral dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan keserasian dan keterpaduan program-program sektor yang dapat meminimalkan konflik-konflik antar sektor yang terjadi.
- c. Pengembangan jaringan transportasi nasional, wilayah, dan lokal untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama terkait dengan arahan pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara termasuk juga arahan pengembangan alokasi bandara dan pelabuhan.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata dari proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- e. Peningkatan keterpaduan program dengan keterlibatan berbagai sektor dalam pengembangan pariwisata.
- f. Penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail untuk pengembangan pariwisata dengan mengacu kepada arahan RTRWN dan RTRW Provinsi untuk tingkat yang lebih makro, dan mengacu kepada arahan RTRW dan RDTR Kawasan di Kabupaten/Kota untuk tingkat yang lebih detail. Yoeti (2011:51)

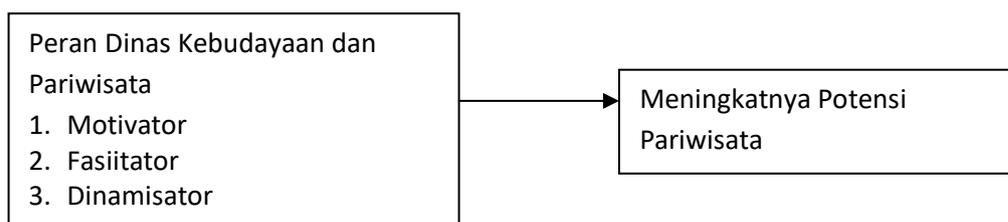
4. Pemanfaatan standar teknis sektoral dalam menyusun rencana detail/rinci pengembangan kawasan pariwisata.

Pembangunan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat banyak. Kita menyadari bahwa bila pada suatu daerah tujuan wisata industri pariwisatanya berkembang dengan baik, dengan sendirinya akan memberikan dampak yang menguntungkan bagi daerah itu. Secara langsung dampak yang dirasakan daerah destinasi wisata adalah melalui pendapatan asli daerah (PAD). Pada umumnya objek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah akan menjadi salah satu sumber Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

B. Variabel dan Indikator Penelitian

Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah variable tunggal yaitu Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura, dengan indicator mengacu pada Pitana dan Gayatri (2007:95), Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai berikut : Motivator, Fasilitator dan Dinamisator

C. Kerangka Konseptual



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Dalam penelitian ini tipe dan dasar penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala lain dalam masyarakat. Jadi penelitian ini berusaha memberikan gambaran umum mengenai Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura.

Dasar penelitiannya adalah survei yaitu mengadakan penyelidikan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan yang faktual mengenai Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura

B. Unit Analisis

Sebagai unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Pengertian Populasi menurut Sugiyono dalam Pabundu (2006:27) mengemukakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulan. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura yang berjumlah 28 orang.

2. Sampel

Menurut pendapat Arikunto dalam Bakri (2005:29), tentang cara pengambilan sampel jika populasi kurang dari 100 maka populasi dapat dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu total sampling (sampel jenuh) karena populasi kurang dari 100 orang, maka jumlah sample ditetapkan sebanyak 28 responden.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini adalah : Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif . Dengan sumber data terdiri dari

- Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil pengamatan melalui observasi di lapangan dan yang diperoleh pula dari hasil kuisioner
- Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis lakukan adalah : Observasi, Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala atau fenomena; Kuisioner, Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang akan dibagikan ke responden dan Dokumentasi, Dokumentasi adalah pengambilan gambar saat melakukan penelitian

F. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diinginkan telah diperoleh maka tahap berikutnya adalah proses pengolahan data. Proses pengolahan data ini merupakan pengolahan data mentah yang didapatkan langsung dari responden baik itu berupa observasi, dan kuisioner yang kemudian akan dianalisis dan ditarik kesimpulan.

Dalam pengolahan data ini, penulis menggunakan 3 (tiga) tahapan dalam pengumpulan data yaitu:

- Editing , Pengolahan data tahap pertama yakni, dengan memeriksa kembali semua jawaban yang masuk, apakah data dimaksud sudah sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian, hal ini untuk menghindari adanya data yang kurang sesuai.
- Koding , Setelah melalui pemeriksaan data, kemudian penulis lanjutkan dengan mencantumkan kode tahap unit-unit pertanyaan, ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data dari setiap jawaban yang dianggap memenuhi kriteria yang dibutuhkan.

3. Tabulating , Merupakan langkah akhir dari pengolahan data, yakni dengan memasukkan data yang telah diolah sebelumnya ke dalam tabel, dengan menggunakan alat bantu berupa perhitungan prosentase, dengan menggunakan rumus Sarwono (2006:232) sebagai berikut :

RUMUS :

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

- P = Porsentase.
- N = Jumlah Sampel
- F = Frekuensi.
- 100 = Nilai konstanta.

IV . HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah, maka pada bagian ini penulis akan membahas beberapa komponen utama yang dijadikan sebagai masalah utama yang akan peneliti bahas, hal-hal yang

berhubungan dengan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jayapura.

Berdasarkan hal tersebut ada beberapa indikator yang ditetapkan dalam variabel peran Dinas kebudayaan dan Periwisata dalam mengembangkan objek wisata di kabupaten Jayapura yang antara lain : Motivator, Fasilitator, Dinamisator

a. Motivator

Motivator dalam pengembangan pariwisata, adalah peran pemerintah daerah untuk selalu mendukung pembangunan di bidang pariwisata. Dalam indicator ini ada dua sub indicator yang akan di kaji yaitu Pembinaan masyarakat dan Sosialisasi

Untuk mengetahui apakah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melaksanakan perannya dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pengembangan objek wisata dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel.4.1

Tanggapan Responden Tentang Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam Pembinaan Terhadap Masyarakat Terkait Dengan Pengembangan Objek wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Selalu	18	64.29 %
Sering	6	21.43 %
Kadang-Kadang	2	07.14 %
Tidak Pernah	2	07.14 %
Jumlah	28	100 %

Sumber : Data diolah 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selalu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengembangan objek wisata sebanyak 18 orang atau 64.28%, yang menjawab sering sebanyak 6 orang atau 21.43% yang menjawab kadang-kadang sebanyak 2 orang atau 07.14% dan yang menjawab tidak pernah ada pembinaan terhadap masyarakat terkait dengan pengembangan objek sebanyak 2 orang atau 07.14%. Dari pemaparan tabel diatas

terlihat bahwa Dinas selalu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dalam pengembangan objek.

Terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat tentang pengembangan objek wisata, hal yang tidak kalah pentingnya apakah ada sosialisasi dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk memotivasi masyarakat agar ikut andil dalam pengembangan objek wisata. Untuk melihat hal tersebut dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Tanggapan Responden Tentang Sosialisasi Dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura Kepada Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Selalu	8	28.57 %
Sering	10	35.71 %
Kadang-Kadang	6	21.43 %
Tidak Pernah	4	14.29 %
Jumlah	28	100 %

Olahan data primer, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab selalu ada sosialisasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura pada masyarakat dalam pengembangan objek wisata sebanyak 8 orang atau 28.57%, yang menjawab sering ada sosialisasi sebanyak 10 orang atau 35.57% dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang atau 21.43% dan yang menjawab tidak pernah ada sosialisasi sebanyak 4 orang atau 14.29%.

b. Fasilitator

Dalam suatu organisasi/ instansi sangat diperlukan peran pemerintah dalam menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan untuk pengembangan objek wisata. Dengan sub indikaor Penyediaan sarana prasarana, Promosi wisata, Pemeliharaan objek wisata

Sarana Prasarana sangat mendukung pengembangan objek wisata karena wisatawan akan merasa nyaman jika sarana terpenuhi. Untuk mengetahui apakah penyediaan sarana prasarana terpenuhi dalam pengembangan objek dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel.4.3
Tanggapan Responden Tentang Penyediaan Sarana Prasarana Dalam Pengembangan Objek Wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Selalu	9	32.14 %
Sering	12	42.86 %
Kadang-Kadang	7	25.00 %
Tidak Pernah	0	00.00 %
Jumlah	28	100 %

Olahan data primer, 2019.

Berdasarkan tabel diatas didapat hasil bahwa sebanyak 9 orang atau 32.14% yang menjawab selalu, dan yang menjawab sering sebanyak 12 orang atau 42.86% responden, yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang atau 25.00%.

Dalam pengembangan objek wisata tidak terlepas dari promosi baik dari pemerintah maupun

masyarakat. Dikenalnya suatu objek wisata karena adanya promosi dan ada daya tarik dari abjek itu untuk wisatawan yang akan datang berkunjung. Untuk mengetahui apakah ada promosi dalam pengembangan objek wisata khususnya di kabupaten Jayapura dapat di lihat pada tabe di bawahini

Tabel.4.4
Tanggapan Responden Tentang Apakah Ada Promosi Dalam Pengembangan Objek Wisata.

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Selalu	6	21.43 %
Sering	20	71.43 %
Kadang-Kadang	2	07.14 %
Tidak Pernah	0	00.00 %
Jumlah	28	100 %

Olahan data Primer, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab selalu sebanyak 6 orang atau 21.43 %, yang menjawab sering sebanyak 20 orang atau 71.43 % dan yang menjawab tidak pernah 2 orang atau 07.14 %.

Jika pengembangan objek telah dilakukan maka supaya,tentu sangat di perlukan kesadaran

semua pengunjung maupun masyarakat setempat harus menjaga kelestariannya dengan cara memelihara tempat wisata tersebut. Untuk mengetahui apakah ada pemeliharaan terhadap objek wisata yang ada dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.4.5
Tanggapan Responden Tentang Apakah Pemeliharaan Terhadap Objek Wisata .

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Selalu	10	35.71 %
Sering	11	39.29 %
Kadang-Kadang	7	25.00 %

Tidak Pernah	0	00.00 %
Jumlah	28	100 %

Olahan data Primer, 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab selalu sebanyak 10 orang atau 35.71%, yang menjawab sering sebanyak 11 orang atau 39,29% dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 7 orang atau 25.00%.

c. Dinamisator

Organisasi dalam mencapai tujuannya harus dapat mencapai hasil yang optimal, dan hal ini bisa terwujud dengan adanya kerjasama yang baik. Demikian halnya dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Jayapura tidak terlepas dari

kerjasama yang baik dari pihak pemerintah (Dinas Pariwisata dengan dinas lainnya), Dinas Pariwisata dengan pihak swasta dan kerjasama Dinas Pariwisata dengan masyarakat dalam mengembangkan objek wisata. Untuk megkaji lebih dalam lagi ada tiga sub indicator yang akan di kaji dalam penelitian ini

Untuk mengetahui apakah ada kerja sama yang baik Dinas Pariwisata dengan dinas lainnya dalam mengelolah obejek wisata dapat diihat pada tabel di bawah ini

Tabel.4.6

Tanggapan Responden Tentang kerjasama dari Dinas Pariwisata dengan Dinas lainnya yang terkait dalam mengelolah objek wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Sering	10	35.71 %
Selalu	12	42.86 %
Kadang-Kadang	6	21.43 %
Tidak Pernah	0	100.00 %
Jumlah	28	100 %

Sumber : Data diolah 2019.

Berdasarkan tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab sering sebanyak 10 orang atau 35.71 %, responden yang menjawab selalu sebanyak 12 orang atau 42.86 % dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang atau 21.43 % responden.

Kemudian untuk mengetahui apakah selalu ada kerjasama Dinas Pariwisata dengan pihak swasta dalam mengembangkan objek wisata, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.4.7

Tanggapan Responden Kerjasama Dinas Pariwisata dengan Pihak Swasta dalam Mengembangkan Objek Wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Sering	7	25.00 %
Selalu	10	35.71 %
Kadang-Kadang	10	35.71 %
Tidak Pernah	1	03.58 %
Jumlah	28	100 %

Sumber : Data diolah 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab sering sebanyak 7 orang atau 25.00 %, dan yang menjawab selalu sebanyak 10 orang atau 35.71 % dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 10 orang atau 35.71% dan yang menjawab tidak pernah sebanyak 1 orang atau 03.58

Kemudian untuk mengetahui apakah ada kerjasama yang baik dengan masyarakat khususnya masyarakat di sekitar objek wisata dalam pengembangan objek. Untuk mengetahui hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel.4.8

Tanggapan Responden Tentang Kerjasama dengan Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata

Kategori Jawaban Responden	Frekuensi	Prosentase
Sering	15	53.57 %

Selalu	8	28.57 %
Kadang-Kadang	5	17.86 %
Tidak Pernah	0	00.00 %
Jumlah	28	100 %

Sumber : Data diolah 2019.

Berdasarkan Tabel diatas didapat hasil bahwa dari 28 responden yang menjawab sering sebanyak 15 orang atau 53.57%, yang menjawab cukup selalu sebanyak 8 orang atau 28.57 % dan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 5 orang atau 17.86 %.

B. Pembahasan

Berdasarkan pada hasil olahan data pada point terdahulu, maka untuk melihat hasil penelitian dari indikator-indikator yang telah peneliti tentukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Di Kabupaten Jayapura, maka dapat di lihat dari hasil pembahasan berdasarkan indikator sebagai berikut:

1. Motivator

Peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar masyarakat dapat sadar akan pentingnya pariwisata selain itu untuk stakeholder lain seperti swasta peran motivator diperlukan agar geliat usaha di bidang pariwisata terus berjalan dan meningkatnya jalinan kerja sama yang baik antara seluruh stakeholder. Untuk membangun pariwisata berbasis masyarakat maka yang perlu ditingkatkan adalah peran motivator agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat maupun swasta. Dalam hal ini Dinas perlu berperan aktif dan agresif untuk memainkan peran motivator demi terbangunnya pengembangan objek wisata.

Dari pemaparan data sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa dinas pariwisata sudah melaksanakan tugas tetapi belum menjangkau semua objek wisata yang ada di kabupaten jayapura. Demikian juga masyarakat, ada yang kurang merespon kegiatan pembinaan dan sosialisasi yang di laksanakan pemerintah karena kesibukan dalam pekerjaan sehari-hari.

Untuk mendukung keberhasilan pengelolaan objek pemerintah harus berperan aktif dalam mendata objek-objek wisata yang ada di kabupaten jayapura, selanjutnya pemerintah dalam hal ini dinas terkait yaitu dinas pariwisata harus memberikan perhatian penuh pada semua objek, jangan hanya objek-objek wisata tertentu saja. Menurut hasil pengamatan penulis masih banyak objek-objek yang belum dikelola dengan baik. Padahal objek tersebut sudah sering di kunjungi oleh masyarakat dan sudah terdaftar di dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Masyarakat juga harus turut berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata agar suatu kelak kabupaten jayapura bisa

menjadi Daerah Tujuan wisata baik dari wisatawan domestic maupun mancanegara.

2. Fasiitator

Indikator penelitian yang kedua adalah fasilitator. Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oeh pengelola untuk kebutuhan wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura berupaya untuk memfasilitasi penunjang sarana dan prasarana selain itu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memfasilitasi promosi objek wisata sampai dengan pemeliharaan ojek wisata atau destinasi wisata.

Berdasarkan hasil olahan data diatas penulis menyimpulkan bahwa pemeliharaan objek wisata sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah mendapat control dari pemerintah, namun belum merata untuk semua objek yang ada di kabupaten jayapura karena belum mendapat perhatian dari pemerintah khususnya Dinas Pariwisata.

Untuk objek yang sudah mendapat perhatian dari pemerintah, masyarakat yang berada di lokasi ojekt tersebut harus mendukung pemeliharaan fasilitas objek agar bisa menjadi contoh untuk objek wisata lainnya. Pihak pemerintah juga harus memperhatikan fasilitas objek-objek yang lain agar pengelolaannya bisa terlaksana dengan baik

3. Dinamisator

Indikator yang ketiga dalam penelitian ini adalah Dinamisator. Dalam Pilar Good Governance agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata di Kabupaten Jayapura memiliki peran ntuk mensinergikan ketiga pihak tersebut agar di antaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Sebagai upaya dinamisasi antar stakeholder pengembang pariwisata di kabupaten Jayapura Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama ini telah melakukan berbagai hal terkait dengan kerjasama antar sektor baik itu sektor swasta sektor pemerintah lainnya maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis indkator ketiga penulis menyimpulkan bahwa kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat sudah terlaksana walaupun dalam pengembangan objek khususnya di kabupaten jayapura belum

maksimal. Karena hanya objek-objek tertentu yang menjadi pusat perhatian pemerintah sementara masih banyak objek-objek lain yang belum tersentuh dengan perubahan dalam pengembangan objek wisata

V. Kesimpulan

1. Untuk hal-hal yang berkenaan dengan indicator pertama tentang dinas pariwisata sudah melaksanakan tugas tetapi belum maksimal karena dari tiga objek yang diteliti hanya dua objek yang mendapat perhatian dari dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura
2. Untuk indicator kedua yaitu fasilitas dan pemeliharaan objek wisata sudah dilakukan oleh masyarakat dan sudah mendapat control dari pemerintah, namun belum merata untuk semua objek yang ada di kabupaten jayapura.
3. Untuk indicator ketiga kerjasama antara Dinas Pariwisata dengan Dinas Terkait, pihak swasta dan masyarakat sudah terlaksana walaupun dalam pengembangan objek khususnya di kabupaten jayapura belum maksimal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bakri Nazar H Moh, 2005 Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Gayatri Putu G & Pitana I Gde, 2007. Sosiologi Pariwisata Andi Publisher Jakarta
- Marpaung Happy. 2014. Pengetahuan Kepariwisata. Alfabeta. Bandung
- Pariwisata Kabupaten Jayapura 2017 (Manfaat Pariwisata dalam dunia Usaha) Pemerintah Daerah
- Pendit, Nyoman S.2012. Ilmu Pariwisata. Pradnya Paramita Yogyakarta
- Pabundu Tika.2006 Metodologi Riset Bisnis. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Rivai, Veithzal,2013. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Suantoro Gamal. 2013.Dasar-Dasar Pariwisata. Andi : Jogyakarta
- Suryono Bambang.2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata.Gaya Media. Bandung
- Sarwono.S.W. 2006 Metode Analisa Data (Dimensi Metodologis Dalam Penelitian Sosial). Usaha Nasional. Surabaya.
- Yoeti Oka. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata. Pradnya Paramita.Jakarta
- Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.